

02 GOVERNMENT
300 BUMD Rugi Hingga Rp5,5 Triliun
Gegara Ordal Kepala Daerah**04 NUSANTARA**
Redenominasi Rupiah Rp 1.000
Jadi Rp 1 Gagal**10 LISTSTYLE**
Labuan Cermin, Danau Dua Rasa
di Kalimantan Timur

MENANTI LANGKAH MENGATASI ODOL

Kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) kerap kali terlihat di jalan raya. Meski pemerintah sudah kerap kali memberikan aturan tentang ODOL, namun kendaraan yang dimensinya (ukuran) atau muatannya (berat) melebihi batas ini tetap beroperasi. Bahkan pelanggaran pertahunnya sangat signifikan. Diperkirakan ada 32.000 kendaraan ODOL beroperasi setiap hari di Indonesia. Pelanggaran ODOL ini tidak hanya mengakibatkan kerugian secara materi saja, namun juga kerugian immateriil. Kerugian akibat truk ODOL ditaksir mencapai Rp 41 triliun per tahun akibat terjadinya kerusakan jalan, biaya perbaikan, hingga biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan. Sedangkan immateriil mencakup kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rasa sakit, trauma, kehilangan waktu, dan gangguan psikologis akibat kecelakaan. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih. Bahkan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap dampak yang ditimbulkan dari ODOL. Tercatat ratusan ribu kasus ke-celakaan dengan banyak korban jiwa terjadi akibat dampak ODOL. Nah, seperti apakah perhatian pemerintah terhadap pelanggaran ODOL ini?

BACA HAL 11...

Kerugian Akibat Truk ODOL (Over Dimension Over Loading)

Kerugian Materiil:

**Kerusakan Infrastruktur:**

Truk ODOL mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Beban berlebih menghancurkan konstruksi yang tak dirancang untuk itu. Biaya perbaikannya? Bisa tembus Rp41 triliun per tahun.

**Kerusakan Kendaraan:**

Truk dipaksa angkut melebihi kapasitas. Akibatnya, komponen cepat aus, rem tak maksimal, dan kendaraan jadi bom waktu di jalan.

**Kecelakaan:**

ODOL meningkatkan risiko kecelakaan serius. Ini berarti biaya pengobatan, hilangnya pendapatan korban, serta gugatan hukum bagi pemilik truk.

Kerugian Immateriil

**Penderitaan & Trauma:**

Kecelakaan karena ODOL sering berujung luka parah atau kematian. Korban dan keluarga menanggung rasa kehilangan, trauma, dan stres berkepanjangan.

**Hilangnya Waktu & Produktivitas:**

Truk mogok, kecelakaan, atau proses hukum memakan waktu. Dampaknya: aktivitas bisnis terganggu, produktivitas menurun.

**Gangguan Psikologis:**

ODOL tak cuma bahaya fisik. Ketegangan di jalan, ketakutan saat berkendara dekat truk, bisa berkembang jadi kecemasan atau gangguan mental.



300 BUMD Rugi Hingga Rp5,5 Triliun Negara Ordal Kepala Daerah



Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Sebanyak 27,5 persen dari total 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami kerugian. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dari jumlah BUMD tersebut, 678 BUMD memperoleh laba, 300 BUMD rugi, dan 113 BUMD lainnya belum melaporkan data yang terakhir. Ironisnya penyebab kerugian karena keberadaan orang dalam (ordal) Kepala Daerah.

Tito juga menyayangkan kecilnya kontribusi dividen dari BUMD. Dari total aset sebesar Rp 1.240 triliun yang dimiliki oleh 1.091 BUMD, hanya sekitar Rp 13,02 triliun yang berhasil dibukukan sebagai dividen atau hanya 1% dari total aset. Sementara itu, total laba tercatat Rp 29,6 triliun dan kerugian Rp 5,5 triliun, menghasilkan laba bersih Rp 24,1 triliun atau sekitar 1,9% dari total aset.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini memaparkan bahwa BUMD tingkat kabupaten yang paling banyak merugi ditemukan di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur merupakan daerah yang menyumbang paling banyak jumlah BUMD tingkat kota yang merugi. Lalu di level provinsi, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan merupakan dua daerah yang paling banyak memiliki BUMD merugi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Tito mengungkap bahwa salah satu penyebab utama BUMD tidak sehat ialah keberadaan tim sukses pendukung kepala daerah terpilih dalam struktur BUMD.

"Bapak ibu, menyampaikan lebih detail lagi, (BUMD) diisi oleh tim sukses dan tim sukses itu bukan orang profesional. Itu fakta lapangannya begitu," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menyebut, bahwa orang dekat kepala daerah bisa mengisi jabatan BUMD selama memiliki kemampuan

profesional. Untuk itu dia mengatakan bahwa kriteria-kriteria pengelola BUMD itu perlu dirumuskan dan ditetapkan menjadi instrumen khusus.

Instrumen khusus itu sangat diperlukan agar nantinya kepala daerah terpilih lebih mengedepankan profesionalisme dibanding relasi pribadi dalam memilih pengelola BUMD. "Tim sukses juga boleh asalkan profesional, memiliki kriteria. Tapi enggak asal taruh yang kemudian (BUMD) menjadi rugi. Setelah rugi, jadi beban dari kepala daerah berikutnya," kata Tito.

Tito juga menyampaikan bahwa tidak jarang dari para tim sukses terlibat pengelolaan BUMD. Kondisi ini yang menjadi salah satu masalah, sebab tenaga kerja yang tidak memiliki kecakapan dalam manajemen BUMD hanya akan menjadi beban direksi, komisaris maupun pegawai.

Menurut Tito, penyebab lain dari 300 BUMD merugi adalah lemahnya tata kelola terutama pengawasan. Hal itu ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah dewan pengawas atau komisaris sebanyak 1.993 sedangkan jumlah direksinya hanya 1.911.

"Lemahnya tata kelola BUMD ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah dewan pengawas, komisaris, jumlahnya 1.993 artinya Dewan Pengawas Komisaris lebih banyak dibandingkan direksinya, 1.911," ujar Tito, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, dilansir detikFinance, Rabu (16/7/2025).

"Dan juga terjadi kelemahan pengawasan baik internal oleh BUMD yang bersangkutan, juga eksternal karena ada 342 BUMD yang belum memiliki satuan pengawas internal,"

lanjut mantan Kepala Polri itu.

Tito juga menyebutkan lemahnya sistem pengawasan sebagai faktor yang memperburuk kinerja BUMD. Ada 342 BUMD yang belum memiliki satuan pengawasan internal, dan pengawasan eksternal juga dinilai belum berjalan optimal.

Dari 823 BUMD yang tercatat, hanya 346 (42%) yang dinilai dalam kondisi sehat. Banyak BUMD dinilai tidak efisien, dengan pengeluaran modal besar namun keuntungan sangat minim. Tito mencontohkan BUMD yang menanamkan modal Rp 30 miliar, tapi hanya mendapatkan laba Rp 87 juta dalam satu tahun.

Atas dasar hal itu, Tito mengusulkan penguatan pengawasan BUMD melalui sejumlah tahapan. Pertama, pengaturan kedudukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku pembina dan pengawas BUMD yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Tito meminta peran pembinaan dan pengawasan Mendagri dalam seleksi, penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris hingga direksi BUMD diatur secara khusus. "Ini terutama untuk menjamin yang terpilih adalah orang-orang profesional," ujar dia.

Ketiga, dia juga menyoroti belum adanya peran Menteri Dalam Negeri dalam pengaturan pola karier yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Keempat, Tito menyebut, kewenangannya dalam memberi penghargaan, menghukum

"Kami mohon kiranya kepada Komisi II DPR dapat mendukung terbentuknya undang-undang tentang BUMD agar lebih tegas untuk mengatur pengelolaan masalah BUMD atas inisiatif pemerintah,"

TITO KARNAVIAN
Menteri Dalam Negeri

Kondisi & Kinerja BUMD

- Total: 1.091 BUMD
- Rugi: 300 (27,5%), Untung: 678, Belum Laporkan: 113
- Aset: Rp 1.240 triliun
- Laba Bersih: Rp 24,1 triliun (1,9%)
- Dividen: Rp 13,02 triliun (1%)

Masalah Utama

- Banyak diisi tim sukses non-profesional
- Usaha tak sesuai potensi daerah
- Lemah pengawasan: 342 tanpa pengawas internal
- Ketimpangan: 1.993 pengawas vs 1.911 direksi

Solusi yang Diusulkan

- Bentuk UU khusus BUMD
- Perkuat peran Mendagri dalam seleksi & pengawasan
- Wajib profesional, bukan sekadar relasi politik

Sumber: Paparan Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR, 16 Juli 2025 (data kinerja BUMD tahun 2024).

hingga membubarkan BUMD belum diatur.

Menurut Tito penguatan peran Mendagri dalam pengawasan BUMD dapat diakomodasi dengan penyusunan Undang-Undang khusus. "Kami mohon kiranya kepada Komisi II DPR dapat mendukung terbentuknya undang-undang tentang BUMD agar lebih tegas untuk mengatur pengelolaan masalah BUMD atas inisiatif pemerintah," tuturnya. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan draf Undang-Undang BUMD.

Selain itu, Tito juga melihat adanya faktor lain yaitu ketidaksesuaian pada waktu membentuk BUMD dengan potensi daerah. "Potensi daerahnya bidangnya pertanian, tapi bicaranya masalah konstruksi, BUMD-nya konstruksi. Nggak tepat. Padahal potensi lain, potensinya pariwisata, tapi kemudian masuknya ke masalah tambang. Nggak cocok gitu," kata Tito usai rapat. (ant,ist/lut)



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: dok/vel

Puan : Sejuta Sarjana Nganggur karena Sistem Koneksi Lemah

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia yang telah menembus angka 1.010.652 orang pada tahun 2025. Puan mengatakan, fakta ini menunjukkan lemahnya sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan arah pembangunan ekonomi nasional secara struktural.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana yang masih kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan bahwa sistem kita, baik pendidikan maupun pasar kerja, belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan membuka data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana.

Dalam data terbaru yang dilaporkan BPS itu, tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76 persen dari angkatan kerja RI berdasarkan status pendidikannya. Di jajaran pertama, jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP 2,42 juta orang. Di posisi kedua, ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta.

Pada posisi ketiga, pendidikan SMK menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang, disusul lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang. Terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsih 177,39 ribu orang pengangguran.

Terkait data tersebut, Puan menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, Pemerintah harus bertindak cepat dan berani mengambil langkah-langkah korektif secara menyeluruh.

Puan mendorong agar Pemerintah mengevaluasi sistem pendidikan tinggi dan SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan.

“Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” tegas mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan mengusulkan agar Pemerintah memfasilitasi pembentukan Pusat Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis Indonesia, sebagai tempat pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan lanjutan (upskilling) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan dunia kerja.

“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman. Mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, sampai energi terbarukan. Negara harus hadir menciptakan sistem pembelajaran seumur hidup,” papar Puan.

Puan juga menilai perlunya kebijakan ekspansi sektor produktif dan investasi lapangan kerja yang fokus pada industri padat karya bernilai

tambah, sektor hijau, dan ekonomi digital.

“Regulasi dan insentif fiskal harus diarahkan untuk menciptakan lebih banyak ruang kerja formal, bukan sekadar menumbuhkan sektor informal,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Puan pun mendorong Pemerintah membangun platform digital terpadu lintas kementerian dengan melibatkan

“Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana yang masih kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan bahwa sistem kita, baik pendidikan maupun pasar kerja, belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri,”

Puan Maharani

Ketua DPR RI

Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis.

“Lintas kementerian ini harus mampu menyambungkan pencari kerja lulusan sarjana/SMK dengan pelatihan dan lowongan kerja yang relevan. Serta menginformasikan proyeksi pekerjaan masa depan berbasis

data,” ungkap Puan.

“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai. Kita butuh orkestrasi, bukan solusi parsial,” lanjut cucu Proklamator RI Bung Karnor itu.

Puan juga menekankan bahwa fenomena pengangguran sarjana adalah potret stagnasi perencanaan pembangunan manusia nasional. Jika tidak segera ditangani, ia menilai bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi dalam waktu yang tidak lama.

“Negara harus hadir bukan hanya dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya,” pungkas Puan.

Sementara itu, Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2019 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rendah, yakni urutan ke-74 dari 79 negara, atau berada di posisi ke-6 terendah secara global.

Meskipun terdapat sedikit peningkatan skor PISA Indonesia pada tahun 2022 dalam literasi, matematika, dan sains, tren rata-rata hasil PISA Indonesia menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun stagnan dalam rentang waktu 20 tahun terakhir.

Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan yang terjadi masih belum konsisten atau cukup signifikan untuk mengubah posisi fundamental Indonesia dalam skala global.

Berdasarkan peringkat kualitas pendidikan di Asia Tenggara, beberapa studi menempatkan Indonesia di posisi ke-4, tertinggal dari Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 2), dan Thailand (peringkat 3).

Menurut OECD, tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia juga masih rendah, dengan angka gross enrollment ratio sebesar 31,5%, di bawah Malaysia (36%) dan jauh di bawah Thailand (51,2%).

Situasi ini berdampak langsung pada daya saing Indonesia yang diukur dari kualitas sumber dayanya. Menurut The World Economic Forum (WEF) tahun 2018, daya saing Indonesia menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei.

Selain masalah kualitas, tenaga kerja Indonesia juga punya masalah produktivitas. Bahkan, berada di bawah rata-rata Asia Tenggara. Pada 2023, produktivitas per pekerja Indonesia hanya sekitar US\$14 per jam kerja, menempatkan Indonesia di peringkat kelima di kawasan ini.

Negara-negara seperti Singapura (US\$ 74), Brunei (US\$49), Malaysia (US\$ 26), dan Thailand (US\$ 15) memiliki produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih tinggi. Hal ini mempertegas bahwa kontribusi tenaga kerja Indonesia terhadap PDB per kapita masih rendah dibandingkan negara tetangga. (rls.ist/lut)

REDENOMINASI RUPIAH RP 1.000 JADI RP 1 GAGAL

Soal redenominasi rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 tidak bisa dilakukan. Kepastian ini usai Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 gagal. Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan setelah dua kali diajukan dalam waktu yang berdekatan oleh pemohon yang sama, advokat, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak redenominasi rupiah. Mahkamah menilai kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang fundamental dan perlu dilakukan kajian secara strategis.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan perkara nomor 94/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di MK, Kamis (17/7/2025).

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan, kebijakan redenominasi perlu ditetapkan ke dalam sebuah undang-undang. Sehingga, akan lebih tepat permohonan ini ditujukan kepada pembuat undang-undang.

"Untuk maksud tersebut, permohonan seharusnya memperjuangkan melalui pembentuk undang-undang. Sebab kebijakan redenominasi mata uang rupiah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah atau memaknai norma sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh pemohon," jelas hakim MK, Enny Nurbaningsih.

Hakim MK, Enny Nurbaningsih, Senin (30/9).

Selain itu, untuk melaksanakan redenominasi, MK menilai perlu ada kajian yang dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut pun saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

"Kebijakan redenominasi mata uang rupiah pada dasarnya merupakan kebijakan fundamental yang memiliki konsekuensi luas terhadap sistem moneter, transaksi keuangan, dan psikologi masyarakat," ungkapnya.

Gugatan Pertama Dinilai Kabur

Dalam putusan sebelumnya yang dibacakan MK pada 14 Mei 2025, majelis menyebut gugatan ini tidak jelas alias kabur alias obscur.

Alasan MK saat itu menyebut kabur karena permohonan Zico tidak lazim dan kontradiktif. "Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo (tersebut), karena permohonan a quo tidak jelas atau kabur, maka terhadap kedudukan hukum pemohon, pokok permohonan, dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra, saat itu.

Dengan alasan yang demikian, MK kemudian menghentikan perkara ini di tingkat dismissal. Namun, berselang seminggu setelah putusan dibacakan MK, Zico kembali mengajukan hal yang sama, tertanggal 27 Mei 2025.

Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak menggugat Pasal 5 Ayat 1 Huruf C dan Pasal 5 Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ke MK.



Warga menunjukkan pecahan uang rupiah saat penukaran di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (dok)

Penggugat meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk redenominasi atau melakukan pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah. Sebagai contoh pecahan Rp 1.000 diredenominasi menjadi Rp 1 saja.

Zico menilai Pasal 5 ayat 1 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Ciri umum rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat 2 paling sedikit memuat: c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengkonversi angka Rp 1.000 (seribu rupiah) menjadi Rp 1 (satu rupiah)," tulis isi permohonan Zico. (wid,rls,ant/dya)

Mata Uang RI Lesu Usai BI Rate Turun, Ada Apa?

KURS rupiah mengalami tekanan pada, Kamis (17/7/2025). Dipicu oleh sentimen negatif dari kondisi perekonomian global yang tengah penuh gejolak, hingga membuat Bank Indonesia (BI) harus melakukan intervensi di pasar uang.

Per pukul 11.22 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp 16.320/US\$, tertekan dibanding level pembukaan perdagangan Rp 16.270/US\$. Dibanding penutupan perdagangan kemarin yang sebesar Rp 16.265/US\$, level saat ini jauh lebih lemah.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pergerakan rupiah itu sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya yang tengah melemah.

"Terutama dipengaruhi oleh masih terus berlanjutnya ketidakpastian sehubungan dengan perkembangan akhir kebijakan tariff Amerika kepada berbagai negara,"

ucap Erwin Kamis (17/7/2025).

Sentimen negatif yang memengaruhi pelaku pasar keuangan ia sebut juga dipengaruhi ketegangan hubungan antara Presiden Trump dengan Ketua The Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell.

"Ini juga menjadi perhatian pasar di mana berkembang informasi pengusulan pemecatan Powell yang kemudian dibantah oleh Presiden Trump," papat Erwin.

Karena faktor penekan mata uang Garuda bersumber dari sentimen eksternal, BI mengambil sikap intervensi, supaya menjaga pergerakan Rupiah sesuai dengan fundamentalnya.

"Bank Indonesia melakukan langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar offshore pasar spot melalui transaksi NDF, di pasar domestik melalui transaksi spot dan DNDF serta pembelian SBN di pasar sekunder," tegas Erwin. (wid,rls,ist/dya)

NEGARA-NEGARA BERHASIL REDENOMINASI

Hungaria

Redenominasi paling signifikan dalam sejarah dunia terjadi di Hungaria pada tahun 1946. Saat itu, mata uangnya pengó diubah ke forint dengan nilai tukar 400 octillion menjadi 1. Hungaria meredenominasi mata uangnya lantaran mengalami hiperinflasi paling parah yang tercatat dalam sejarah.

Turki

Turki juga pernah memutuskan redenominasi pada 1 Januari 2005. Langkah itu diambil karena nilai tukar lira terhadap dolar AS, menukik tajam. Mata uang lira (TL) diubah menjadi lira baru (YTL). Konversi mata uang lama ke baru yang dilakukan itu dengan menghilangkan sebanyak 6 angka nol, misal 1 YTL untuk 1.000.000 TL.

Ukraina

Ukraina melakukan redenominasi pada tahun 1996. Alasan Ukraina menyederhanakan mata uang karena hiperinflasi pada 1990-an, dampak pecahnya Uni Soviet. Pemerintahnya melakukan penggantian mata uang Ukraina, kabovanets menjadi hryvnias dengan menyederhanakan 5 angka terakhir. Misalnya, 100.000 kabovantsiv diganti menjadi 1 hryvnias.

Rumania

Pemerintah Rumania juga mengambil kebijakan redenominasi pada tahun 2005. Ini dilakukan demi mengatasi inflasi yang tinggi di tahun 1990-an. Mata uang Rumania Lei (ROL) diganti menjadi Leu (RON) dengan memangkas

Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK PERIKSA 17 SAKSI DI POLRES MALANG

Sebanyak 17 saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui sebagian yang dipanggil adalah kepala desa (Kades).



(Kiri-kanan) Kepala Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Muhammad Kholili serta Kepala Desa Gedogkulon Supriyono, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Malang, Kamis (17/7/2025). (dok. Ist)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ternyata memanggil sejumlah kepala desa di Kabupaten Malang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Diketahui, kasus terjadi pada tahun anggaran 2021–2022.

“Pemeriksaan atas nama HA, RUS, ARB, MMN, RNT, SB, MH, SUP, BS, SW, SAM, LDH, AHF, YS, BJR, RUS, dan AS,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Pemeriksaan dilakukan di Satreskrim Polres Malang.

Lebih lanjut Budi menjelaskan identitas saksi HA, RUS, ARB, dan MMN merupakan pihak swasta. Untuk saksi lain di antaranya adalah perangkat Desa Karanganyar, Kepala Desa Ngantru, Kades Simojayan Ampel Gading, Kades Gedok Kulon, direktur di PT Piala Mas Industri, Lurah Plaosan, anggota Badan Permusyawaratan Desa Plaosan, dan Kepala Dusun Patuksari.

Kemudian Ketua Yayasan Bina Swadaya Masyarakat, Penasihat PSM Tunas Lintas Perempuan, Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jatim, aparatur sipil negara di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan direktur utama di PT Putera Tjandra Nyata.

Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (14/7/2025), sempat memanggil anggota DPRD Kota Blitar, Jatim, Yohan Tri Waluyo, dan empat pihak swasta berinisial PS, HU, SC, dan TH sebagai saksi.

KPK pada Selasa (15/7/2025), memanggil Kadus Jeding berinisial KMD, Kades Penataran berinisial KTN, Kades Candirejo berinisial SPM, Kadus Kalicilik Candirejo berinisial YNT, Kades Bangsri berinisial SDK, dan dua pihak swasta berinisial BAP dan MFH.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2024, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Dari 21 orang tersangka korupsi dana hibah, empat orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang

lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Selanjutnya, KPK pada 20 Juni 2025 mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

Salah satu yang dipanggil adalah Kepala Desa Simojayan, Kecamatan

Ampelgading, Muhammad Kholili. Ia mengaku dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang diduga melibatkan eks Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

“Saya Kepala Desa Simojayan dipanggil sebagai saksi berkaitan dengan (kasus korupsi pengelolaan dana hibah) pokmas,” ujar Kholili, sambil menunjukkan surat panggilan sebagai saksi.

Kholili menyampaikan, selain dirinya, ada satu perwakilan pokmas dari Desa Simojayan yang juga telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Malang Kota. Sedangkan dirinya diperiksa di Mapolres Malang.

“Untuk di Simojayan, ada dua yang diperiksa. Yang satu perwakilan pokmas sudah diperiksa di Polresta Malang Kota, saya di Polres Malang,” jelasnya.

Meski demikian, Kholili mengaku tidak mengetahui pasti berapa jumlah kepala desa atau pihak lain yang turut dipanggil KPK dalam perkara ini. “Mungkin banyak, tapi kepastiannya saya tidak tahu. Yang penting saya diminta sebagai saksi, saya hadir,” ucapnya. (san,ist,rls/dya)

Dalami Proses Pembuatan Pokmas



Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA

PENYIDIK KPK mendalami proses pembentukan pokmas yang diduga dibuat oleh koordinator lapangan (korlap) dengan sepengetahuan kepala desa.

Diketahui, KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021–2022.

Dalam pemeriksaan itu penyidik mendalami proses awal pembentukan pokmas yang diduga dibuat oleh koordinator lapangan

(korlap) dengan sepengetahuan kepala desa.

“Penyidik mendalami proses pembuatan pokmas yang diduga dibuat oleh korlap yang berkoordinasi dengan kades,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis.

Selain itu, penyidik juga menelusuri jumlah pokmas yang dibentuk masing-masing korlap dan

mengidentifikasi siapa aspirator yang disebut sebagai pemilik jatah hibah.

Sebelum di Malang, sepuluh saksi juga diperiksa di Blitar. Mereka berasal dari golongan kades hingga dari pihak swasta. Di antaranya adalah Kateno, Suparman, Sodikin, Yunianto, Komarudin, Bagas, Jody, Rendra, Ryan, dan Farhat. Adapun mereka diperiksa di Polres Blitar, Jawa Timur Selasa (15/7/2025).

Terkait dengan kasus ini, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi

termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (KIP) di Polda Jatim pada hari ini Kamis (10/7/2025). Khofifah didalam penyidik berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dana Hibah dari Provinsi Jawa Timur untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

Hari pemeriksaan Khofifah berbarengan dengan pemeriksaan terhadap eks Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi (KUS). Akan tetapi, Kusnadi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sementara itu, kasus dana hibah dengan 21 tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, terkait suap sebesar Rp5 miliar untuk mengurus alokasi dana bagi kelompok masyarakat.

Pada 2022, penyidik KPK mengeledah ruang kerja Khofifah dan Wakil Gubernur Jatim, Email Dardak, dan menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan tersebut, dilakukan penyidik usai menangkan Sahat. (wid,rls,ist,ant/dya)

Polemik Penahanan Ijazah Terapis di Kota Malang Jalan di Tempat, Disnaker Ancam Cabut Izin Usaha



Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan. (Santi/Lentera)

m e n g a t a k a n berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, masih ada 12 ijazah milik karyawan yang belum dikembalikan oleh AMS.

"Dari pihak perusahaan, laporan terbaru, kemarin alasannya adalah pihak pekerja tidak mau i j a z a h n y a dikembalikan. Ini kan lucu. Apakah mungkin ijazah dikembalikan malah tidak mau? Jadi kami dalam dulu," ujar Arif, dikonfirmasi melalui sambungan

selular, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, jika dalam waktu dekat AMS tetap membandel dan tidak segera mengembalikan ijazah karyawan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. "Kalau tetap membandel seperti ini, ya saya cabut saja izin usahanya," tegas Arif.

Arif menyebut, saat ini pihaknya memang memfokuskan pengawasan

terhadap AMS, lantaran kasus ini sudah berlangsung lama dan perusahaan dinilai tidak kooperatif. "Pihak pelaku usahanya juga ribet terus. Awal-awal bilanganya sudah, ternyata ada 60 yang mengaku belum dikembalikan," katanya.

"Belum lagi yang terbaru ini, ada pernyataan dari pihak perusahaan kalau karyawan tidak mau menerima ijazah yang mau dikembalikan. Saya kan tidak percaya juga. Jadi tim kami masih mendalami ke karyawannya," imbuh Arif.

Diketahui, praktik penahanan ijazah ini merupakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha di awal kontrak kerja. Menanggapi hal ini, Arif memastikan pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi kepada calon pekerja.

Ia menegaskan agar pekerja lebih cermat sebelum menandatangani kontrak. "Sudah kami sampaikan jauh-jauh hari dan sering kami sampaikan saat pelatihan kerja juga. Tolong dicermati, jangan asal tanda tangan. Kalau ada penahanan, entah itu ijazah, sertifikat, BPKB, segera laporkan ke kami," jelasnya.

Ditegaskannya, saat ini dengan

alasan apapun, praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sudah dilarang. Bahkan untuk fotokopi ijazah pun sebaiknya hanya yang dilegalisir yang disertakan dalam berkas lamaran kerja.

"Sebenarnya tidak usah juga. Karena sudah ada peraturan perusahaan yang mengikat antara pengusaha dan pekerja, ada hak dan kewajiban yang diatur di situ, selain menahan ijazah," katanya.

Arif mengingatkan, menahan ijazah karyawan justru akan berisiko bagi perusahaan. Jika ijazah itu hilang atau rusak, perusahaan bisa dituntut secara hukum.

Lebih lanjut, Arif juga menyatakan pihaknya telah membuka layanan pengaduan bagi pekerja di Kota Malang. Serta menyediakan layanan call center yang dapat diakses masyarakat.

"Kami sampaikan ke semua pekerja, jangan takut melaporkan resmi ke kami. Akan kami tindaklanjuti. Untuk kerahasiaan pelapor akan kami jaga. Bisa lewat WhatsApp kami atau datang ke tenant kami di Mal Pelayanan Publik (MPP) selama jam kerja," paparnya. (Santi/Dya)

Jatah Rute Transjatim Hanya 5%, Dishub Kabupaten Malang Usul Diperluas

MALANG - Kabupaten Malang hanya mendapat jatah sekitar 5 persen dari keseluruhan rute layanan Bus Transjatim.

Melihat keterbatasan itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang bakal mengajukan usulan perluasan layanan. Agar jangkauan rute di wilayahnya bisa ditambah pada tahap pengembangan selanjutnya.

"Untuk rute Transjatim, kami menyebutnya mulai dari koridor satu. Itu rute yang berasal dari Terminal Batu dan berakhir di Terminal Hamid Rusdi. Dari keseluruhan rute tersebut, Kabupaten Malang hanya mendapat bagian sekitar 5 persen," ujar Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Tri Hermantoro, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

Untuk diketahui, program transportasi massal ini dirancang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Jatim sekaligus menjadi solusi pengurai kemacetan.

Menurut Tri, sebagian besar jalur Transjatim di Malang Raya memang

masih terfokus di wilayah Kota Malang. Sementara di Kabupaten Malang, layanan hanya mencakup sebagian kecil jalur, tepatnya di sepanjang jalur dari Pertigaan Pendem menuju Terminal Landungsari.

"Kalau dari total jalur, dari Pertigaan Pendem sampai Terminal Landungsari, itu baru mencakup sekitar 25 persen. Sisanya sekitar 70 persen berada di wilayah Kota Malang," jelasnya.

Saat disinggung soal kemungkinan penambahan rute layanan di wilayah Kabupaten Malang, Tri menyebutkan pihaknya telah mengajukan usulan ke Pemprov Jatim. Usulan tersebut berupa penambahan layanan hingga ke Terminal Talangagung.

"Untuk perluasan ke wilayah lain, termasuk ke Terminal Talangagung, itu sudah kami sampaikan sebagai masukan. Namun, itu masih menjadi bagian dari rencana untuk pengembangan tahap berikutnya, yaitu di koridor dua," ungkapnya.

Tri menegaskan, usulan tersebut saat ini masih sebatas masukan dan belum masuk dalam pembahasan

teknis. Namun, pihaknya berharap aspirasi itu dapat diakomodasi dalam perencanaan pengembangan rute selanjutnya.

"Masukan itu memang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditampung dan menjadi bagian dari pengembangan Trans Jatim di masa mendatang," katanya.

Sebagai informasi, wilayah Malang Raya masuk dalam cakupan Koridor 7 Transjatim yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025 ini. Sebelumnya, Koridor 6 Transjatim telah beroperasi pada akhir Mei 2025 lalu, yang menghubungkan Terminal Kertajaya di Mojokerto dan Terminal Porong di Sidoarjo.

Lebih lanjut, Koridor 7 Malang Raya, ini dirancang sebagai salah satu jalur utama dalam sistem transportasi

(Ilustrasi) Bus menuju exit tol Singosari, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)



massal Transjatim. Tri mengungkapkan, setidaknya 15 unit bus akan disiapkan untuk beroperasi di jalur yang melintasi wilayah Malang Raya.

Kehadiran armada ini diharapkan mampu menunjang mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah di provinsi ini. (Santi/Dya)

BANDARA ISRAEL JADI SASARAN RUDAL BALISTIK HOUTHY

Kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk meredakan ketegangan dagang dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Cina di Beijing pekan depan tampaknya mengecil, menyusul keputusan Cina memangkas durasi pertemuan dari dua hari menjadi satu.

Pemberontak yang didukung Iran tersebut menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv dengan "rudal balistik Zulfiqar" dan drone, kata juru bicara militer Houthi, Yehya Saree, dikutip dari AFP, Kamis (17/7/2025).

Dalam pernyataan video tersebut, ia juga mengumumkannya serangan drone Houthi terhadap target militer dan pelabuhan Eilat di Israel selatan.

Houthi telah berulang kali melancarkan serangan rudal dan drone terhadap Israel sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023, dengan dalih solidaritas kepada Palestina.

Sebagai tanggapan, Israel telah melancarkan beberapa serangan udara di Yaman, termasuk di kota pelabuhan Hodeida awal bulan ini.

Militer Israel mengatakan bahwa "setelah sirene yang berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa wilayah di Israel, satu rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat".

Pada Rabu (16/7/2025) pagi waktu setempat, pasukan pro-pemerintah di Yaman mengatakan mereka menyita "750 ton senjata" yang sedang dalam perjalanan dari Iran ke Houthi.

Komando Pusat AS memuji operasi tersebut, menyebutnya sebagai "penyitaan senjata konvensional canggih Iran terbesar dalam sejarah mereka".

Tarek Saleh, yang memimpin Pasukan Perlawanan Nasional Yaman, mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial X bahwa penyitaan tersebut mencakup "sistem rudal angkatan laut dan udara, sistem pertahanan udara, radar modern, drone, perangkat pemantau, rudal anti-tank, artileri B-10, lensa pelacak, senapan runduk, amunisi, dan

peralatan militer".

Awal bulan ini, Houthi kembali melancarkan serangan mematikan di Laut Merah dan Teluk Aden, menargetkan kapal-kapal yang mereka tuduh memiliki hubungan dengan Israel. Serangan-serangan ini dilakukan Houthi untuk memaksa Israel mengakhiri perang Gaza.

Sita Kiriman Senjata dari Iran

Masih pada hari yang sama, Pasukan Perlawanan Nasional (NRF), koalisi bersenjata di Yaman yang menentang Houthi turut mengklaim telah menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke kelompok tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dalam pernyataan di X menyebut NRF menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perlengkapan militer.

"NRF menyita lebih dari 750 ton amunisi dan peralatan, termasuk



Pasukan keamanan Israel memeriksa lokasi di mana proyektil yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman mendarat, dekat Bandara Ben Gurion pada hari Minggu. (Foto:AP)

ratusan rudal jelajah, rudal anti-kapal dan anti-pesawat, hulu ledak dan alat pencari, komponen, ratusan mesin drone, peralatan pertahanan udara, sistem radar, serta perangkat komunikasi," tulis CENTCOM. NRF diketahui dipimpin oleh Jenderal Tareq Saleh.

Israel juga menyebutkan, serangan Houthi tak hanya menargetkan wilayah Israel, tapi juga kapal-kapal yang melintasi Teluk Aden, yang disebut memiliki hubungan dengan Israel. Sebagai balasan, Israel telah melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Termasuk di antaranya

serangan ke pelabuhan Hodeida pada awal Juli lalu, seperti dilaporkan Gulf News.

Adapun hingga 14 Juli 2025, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban jiwa sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023 telah melampaui 58.000 orang.

Angka ini kembali meningkat setelah serangan udara terbaru yang dilancarkan Israel pada 13 Juli, menargetkan kawasan padat di Jalur Gaza. Serangan tersebut menghantam pasar di Kota Gaza serta lokasi distribusi air di kamp pengungsi Nuseirat, menewaskan 95 warga sipil Palestina. (AFP,ist/nei)

Area Istana Presiden-Markas Tentara Suriah Diserang

Asap mengepul setelah serangan terhadap Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus, menurut Al Jazeera TV, di Damaskus, Suriah, Rabu (16/7/2025). (Foto: Reuters)



MILITER Israel melancarkan serangan udara yang menghantam wilayah di sekitar istana kepresidenan Suriah di Damaskus pada Rabu (16/7/2025). Aksi tersebut disaksikan langsung oleh seorang sumber dan dilaporkan kepada Reuters.

Serangan tersebut terjadi saat Israel membombardir Damaskus menyusul perang suku Druze dan Arab Badui di Sweida. Israel mengklaim serangannya merupakan bentuk dukungan untuk suku Druze.

Militer Israel telah mengakui bahwa pihaknya meluncurkan serangan yang menargetkan area di

dekat istana kepresidenan Suriah. Mereka bahkan mengonfirmasi serangan yang menasar markas besar tentara Suriah.

"Militer terus memonitor berbagai perkembangan dan tindakan rezim [Suriah] terhadap penduduk Druze di selatan Suriah. Sesuai arahan dari eselon politik, [militer] sedang melancarkan serangan di wilayah tersebut dan tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan," demikian keterangan militer Israel di Telegram, seperti dikutip Al Jazeera.

Serangan Israel di Suriah diluncurkan di saat komunitas Druze dan Arab Badui berperang sejak beberapa hari lalu.

Perang kedua pihak bermula setelah anggota Arab Badui menangkap penjual sayur Druze di jalan raya utama yang menghubungkan Sweida dan Damaskus. Insiden ini memicu kemarahan komunitas Druze hingga

aksi saling culik pun terjadi.

Setelah itu, bentrokan pecah dan tak terkendali. Pasukan keamanan pemerintah Suriah lantas dikerahkan ke lokasi untuk memulihkan ketertiban, namun hal ini dilihat Israel sebagai keberpihakan terhadap suku Badui.

Israel, yang kerap melancarkan serangan ke Suriah dengan dalih mendukung Druze, kemudian ikut campur dengan menyerang tank-tank militer di Suriah selatan.

Bagi Israel, Druze merupakan kelompok yang loyal, yang rela bertugas di militer Zionis.

Druze adalah kelompok minoritas cabang Islam Syiah Ismailiyah yang tersebar di Timur Tengah, termasuk di Israel dan Suriah. Kelompok ini menjadi populasi mayoritas di Sweida, Suriah, yang menempati wilayah itu hingga 90 persen. Sementara itu, populasi Badui hanya sekitar tiga persen di sana.

Komunitas Druze memiliki sejarah sendiri dengan Israel. Setelah kepemimpinan Sunni di Yerusalem mengancam makam suci Druze di Tiberias, komunitas Druze memilih berpihak ke Yahudi. (Reuters, Al Jazeera,ist/nei)



Jalan Kaki ala Jepang

Lebih Efektif dari 10 Ribu Langkah

Selama ini, berjalan Khaki 10.000 langkah per hari dianggap sebagai tolok ukur gaya hidup sehat. Namun, benarkah sebanyak itu diperlukan? Sebuah metode jalan kaki dari Jepang justru menawarkan manfaat yang lebih besar hanya dengan durasi 30 menit per hari—bahkan diklaim bisa memberikan efek hingga 10 kali lebih efektif.

Konsep 10.000 langkah ini sebenarnya berasal dari kampanye pemasaran pedometer 'Manpo-Kei' di Jepang pada 1960-an. Meski bukan angka yang ditentukan lewat sains, jumlah ini jadi populer sebagai target harian. Namun, studi Universitas Granada pada 2023 menyebut 8.000 langkah saja sebenarnya sudah cukup untuk menurunkan risiko kematian dini secara signifikan.

Masalahnya, mencapai 10.000 langkah butuh waktu lebih dari 90 menit per hari. Hal ini tentu tak mudah bagi mereka yang punya jadwal padat. Nah, di sinilah metode jalan kaki Jepang masuk sebagai alternatif.

Lebih Efektif Mana?

Metode ini bukan isapan jempol. Sebuah studi di jurnal Mayo Clinic Proceedings tahun 2007 menguji efektivitas metode interval ini, disebut interval walking training (IWT), dibandingkan jalan kaki biasa atau continuous walking training (CWT)

Penelitian yang melibatkan lebih dari 240 orang dengan usia rata-rata 63 tahun menunjukkan hasil positif pada peserta yang melakukan Intervall Walking Training (IWT). Mereka

mengalami peningkatan kekuatan otot paha hingga 17 persen, kapasitas aerobik naik sebesar 8 persen, serta penurunan tekanan darah sistolik yang lebih signifikan dibandingkan kelompok lain. Menariknya, hasil itu didapat dengan waktu jalan kaki mingguan yang lebih sedikit dibanding peserta CWT.

Menurut dr Elroy Aguiar, pakar jalan kaki dari University of Alabama, aktivitas intensitas tinggi, meski hanya satu menit per hari, bisa berdampak signifikan pada kesehatan metabolik.

"Satu menit aktivitas paling intens setiap hari bisa jadi indikator kuat seseorang punya risiko sindrom metabolik atau tidak," ujarnya.

Metode jalan kaki ala Jepang ini, jika dilakukan 4 kali seminggu, nyaris menyentuh batas 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu yang direkomendasikan organisasi kesehatan dunia (WHO). Cukup menambahkan latihan kekuatan ringan, dan sudah punya paket latihan sehat yang praktis dan minim waktu. Jadi, kalau 10.000 langkah terasa terlalu berat, coba saja cara Jepang ini. Lebih ringan, tapi tetap bikin bugar.

Diketahui ada manfaat lain dari IWT selain memperpanjang umur, yaitu sebagai berikut:

Meningkatkan Kesehatan Jantung

Intervall Walking Training (IWT) terbukti dapat meningkatkan kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Penelitian yang melibatkan lebih dari 240 orang dengan usia rata-rata 63 tahun menunjukkan bahwa peserta

IWT mengalami peningkatan kekuatan otot paha hingga 17 persen, kapasitas aerobik naik 8 persen, serta penurunan tekanan darah sistolik yang lebih besar dibandingkan kelompok lain.

Turunkan Tekanan Darah dan Gula Darah

Penelitian menunjukkan bahwa Intervall Walking Training (IWT) tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Dengan pola jalan kaki bergantian antara intensitas rendah dan tinggi, IWT terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki sirkulasi darah, serta mengontrol faktor risiko penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes.

Meningkatkan Kekuatan Otot

Dapat meningkatkan kekuatan otot kaki dan kebugaran fisik secara keseluruhan. Dengan menggabungkan sesi jalan kaki berintensitas rendah dan tinggi secara bergantian, latihan ini merangsang kerja otot lebih efektif serta memperbaiki kapasitas aerobik, sehingga tubuh menjadi lebih bugar dan kuat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Membantu Penurunan Berat Badan

Dapat membantu membakar kalori dan menurunkan berat badan secara efektif. Kombinasi antara jalan kaki santai dan cepat dalam satu sesi membuat tubuh bekerja lebih keras, meningkatkan pembakaran energi, serta mempercepat metabolisme.

Latihan ini cocok bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan tanpa harus melakukan olahraga berat.

Meningkatkan Kapasitas Aerobik

Dapat meningkatkan kapasitas aerobik, yang merupakan komponen penting untuk menunjang kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap dan menggunakan oksigen, IWT membantu memperkuat jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah, sehingga tubuh menjadi lebih efisien dalam menjalani aktivitas fisik sehari-hari.

Dibandingkan dengan target 10.000 langkah per hari, IWT menawarkan manfaat serupa bahkan lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Berikut perbedaannya:

Jalan Khaki 10.000 Langkah

Meskipun populer sebagai target aktivitas harian, mencapai 10.000 langkah setiap hari bisa jadi sulit dan memakan waktu, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat atau keterbatasan fisik.

IWT

Intervall Walking Training (IWT) menawarkan alternatif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan jalan kaki biasa, karena menggabungkan intensitas rendah dan tinggi dalam satu sesi latihan berdurasi singkat. Dengan pola ini, tubuh mendapatkan manfaat maksimal dalam waktu yang lebih singkat, seperti peningkatan kebugaran. (nei,ist/dya)

Perusahaan Biotek AS Akan Bangkitkan Burung Moa

Colossal Biosciences, perusahaan bioteknologi yang berbasis di Amerika Serikat, mengungkapkan rencananya untuk menghidupkan kembali burung moa raksasa asal Pulau Selatan, Selandia Baru *Dinornis robustus* yang telah punah, dalam waktu sepuluh tahun ke depan.

Melalui rekayasa genetika, perusahaan menyatakan akan menghidupkan kembali burung raksasa tak bisa terbang yang punah sekitar 600 tahun lalu akibat perburuan manusia. "Kami akan menghidupkan kembali dinosaurus burung," tulis Colossal dalam unggahan di Instagram, Kamis, (10/7/2025).

Colossal mengatakan akan bekerja sama dengan ilmuwan dan masyarakat adat untuk menghidupkan kembali spesies moa terbesar dari sembilan yang pernah ada, yang dapat tumbuh hingga setinggi 3,6 meter.

Sebelumnya, perusahaan itu juga mengklaim telah membangkitkan serigala dire (*Aenocyon dirus*), namun klaim tersebut menuai kritik karena hewan yang dihasilkan dinilai hanya serigala abu-abu yang direkayasa.

Rencana kebangkitan moa turut menimbulkan kontroversi di kalangan ilmuwan. Mereka menilai bahwa hasil proyek ini tak akan benar-benar menghadirkan spesies yang sama seperti aslinya.

"Saat ini tidak ada jalur rekayasa genetika yang benar-benar dapat memulihkan spesies yang punah, terutama yang telah hilang dari konteks ekologis dan evolusionernya selama ratusan tahun," kata Philip Seddon, profesor zoologi di University

of Otago, Selandia Baru, kepada Science Media Centre (NZSMC), dikutip dari laporan Live Science. "Hasil akhirnya tidak akan, dan tidak bisa, menjadi moa—harta unik yang tercipta melalui milenium adaptasi dan perubahan."

Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan terkait klaim Colossal atas kebangkitan serigala dire. Kepala Ilmuwan Colossal, Beth Shapiro, menjelaskan kepada New Scientist bahwa hewan yang dihasilkan adalah 'serigala abu-abu dengan 20 pengeditan' dan tidak mungkin menghidupkan kembali sesuatu yang identik dengan spesies yang pernah hidup. Meski demikian, juru bicara perusahaan tetap bersikeras pada klaim bahwa mereka telah menghidupkan kembali serigala dire.

Proses penciptaan kembali moa mencakup analisis DNA

dari tulang-tulang sembilan spesies moa dan perbandingannya dengan DNA burung yang masih hidup, seperti emu dan tinamou—kerabat terdekat moa. Shapiro mengatakan kepada Time Magazine bahwa tim akan mengidentifikasi gen khas moa dan menyisipkannya ke dalam genom burung tersebut.

"Masuk akal menggunakan tinamou dan emu sebagai cetakan DNA untuk menyelaraskan DNA moa," ujar Trevor Worthy, ahli paleontologi vertebrata dari Flinders University, Australia. "Banyak penelitian DNA menunjukkan bahwa tinamou adalah spesies saudara dari moa. Emu juga merupakan kerabat yang cukup dekat."

Sel-sel hasil rekayasa kemudian akan ditanamkan ke dalam induk pengganti dan dibiarkan berkembang. Burung yang menetas tidak akan dilepas ke alam liar atau dikurung di

kebun binatang, melainkan hidup dalam cagar alam berpagar.

Menurut Worthy, meski berukuran besar, moa tidak berbahaya bagi manusia. "Moa tidak akan melihat manusia sebagai ancaman, kecuali jika Anda mencoba memeluknya. Saat ketakutan, besar kemungkinan Anda akan ditendang dan mungkin terluka parah," ujarnya.

Colossal mengklaim proyek ini juga dapat membawa manfaat bagi konservasi, seperti pengembangan teknologi telur buatan untuk spesies terancam punah. "Pasti akan ada kemajuan besar dalam pengetahuan sepanjang jalan menuju de-extinction," kata Worthy.

"Kita akan mendapat wawasan yang belum pernah ada tentang DNA hewan target, dan untuk kelompok punah seperti moa, ini akan sangat menarik dalam hal evolusi, hubungan, dan lainnya," tambahnya. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **INIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Labuan Cermin

Danau Dua Rasa di Kalimantan Timur

Indonesia memang kaya akan pesona. Bukan hanya adat dan budaya, tempat wisata di Indonesia pun menambah kekayaan negara yang berada di garis khatulistiwa ini. Pulau Kalimantan, salah satu pulau yang terlintasi garis khatulistiwa pun memiliki daya pikat luar biasa. Pulau yang kekayaannya alamnya cukup besar ini merupakan salah satu pulau yang wajib dinikmati keindahan alamnya. Tempat ajaib yang cukup unik ada disini, namanya Labuan Cermin.

Danau Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menawarkan keindahan yang unik. Danau ini sering dijuluki danau dua rasa atau danau dua warna. Airnya terdiri dari dua lapisan, yakni air asin di bagian bawah dan air tawar di bagian atas. Fenomena itu disebut sebagai Meromictic Lake.

Cara ke Danau Labuan Cermin

Untuk mencapai Biduk-Biduk, pengunjung harus menempuh perjalanan darat dari Tanjung Redeb, ibu kota Kabupaten Berau. Jaraknya sekitar lima sampai enam jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.

Meski cukup panjang, perjalanan ini akan disugahi pemandangan hutan tropis yang menawan. Saat tiba di wilayah Kecamatan Biduk-Biduk Anda juga akan melihat pemandangan pesisir pantai di sepanjang jalan.

Begitu sampai di lokasi, pengunjung biasanya harus menaiki perahu kecil sekitar 10-15 menit dari dermaga menuju danau. Pengunjung bisa menyewa perahu di dermaga dengan harga Rp 400 ribu. Disarankan pengunjung datang rombongan agar biayanya lebih terjangkau.

Daya Tarik

Danau Labuan Cermin adalah salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur. Labuan Cermin menawarkan daya tarik unik berupa air dua rasa. Ada air asin di bagian bawah dan tawar di permukaan. Ini menciptakan lapisan alami seperti cermin.

Warna airnya sangat jernih hingga dasar danau terlihat jelas. Dikelilingi hutan yang rimbun, suasananya tenang dan sejuk, cocok untuk wisatawan yang ingin menyepi dari hiruk-pikuk kota. Aktivitas utama di danau ini adalah berenang, snorkeling, dan menyelam. Menariknya, perbedaan rasa air memisahkan habitat ikan laut dan ikan air tawar, yang bisa dilihat saat snorkeling.

Ketenangan di Antara Pepohonan

Sensasi pertama yang terasa begitu menjelajahi kawasan Danau Labuan Cermin adalah ketenangan yang menyelubungi danau yang dikelilingi pepohonan hijau rimbun. Tidak ada suara bising kendaraan atau hiruk-pikuk perkotaan.

Airnya begitu jernih hingga dasar danau terlihat dengan jelas meski kedalamannya mencapai empat sampai lima meter. Danau ini dikelilingi pepohonan lebat yang menciptakan suasana teduh dan tenang.

Aktivitas di Danau

Selama berada di lokasi, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga menyelam.

Saat menyelam dengan masker snorkeling, pengunjung bisa melihat ikan-ikan berenang di dekat permukaan maupun di bagian dasar danau. Perbedaan antara air asin dan air tawar membuat ikan-ikan tersebut terpisah, sehingga memudahkan untuk membedakan jenis ikan air laut dan air tawar.

Ketika mencicipi air di permukaan Danau Labuan Cermin, yang terasa di lidah adalah air tawar. Namun, semakin dalam menyelam, akan terasa perbedaan rasa karena bagian dasar danau ini mengandung air laut.

Bagi yang ingin menjelajahi keindahan bawah air Labuan Cermin, disarankan untuk membawa perlengkapan snorkeling sendiri.

Namun jika lupa, di dermaga penyeberangan tersedia tempat penyewaan peralatan snorkeling lengkap dengan pelampung.

Selain itu, pengunjung yang hanya ingin bermain air atau bersantai di atas

ban juga bisa menyewanya langsung di lokasi danau. Tersedia juga papan selancar yang disulap menjadi kano dan bisa disewa untuk merasakan sensasi mengelilingi danau dan menikmati keindahan alamnya dengan mendayung kano.

Konservasi Alam

Selain keindahan alamnya, Labuan Cermin juga menyimpan nilai konservasi.

Rudiansyah yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Biduk-Biduk mengatakan pengunjung diminta ikut menjaga kelestarian kawasan ini, salah satunya dengan menerapkan larangan membuang sampah sembarangan dan merusak ekosistem di sekitar Danau Labuan Cermin.

"Itu sudah kita jelaskan di awal, imbauan bahwa boleh berenang tapi jangan menginjak karang. Karena itu, pertumbuhan karang itu satu tahun dia cuma satu sentimeter. Kita pasang spanduknya juga," kata Rudiansyah.

Rudiansyah menuturkan bahwa kelompoknya kini lebih fokus pada penguatan citra destinasi ekowisata di Danau Labuan Cermin melalui strategi branding dan pemanfaatan media digital, seperti media sosial dan situs web, agar jangkauan promosi bisa sampai ke luar Kalimantan, bahkan merambah ke pasar wisatawan luar negeri. (nei,ist/dya)



Menanti Langkah (dari Hal 1) ...

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan berdasarkan data statistik dari Kepolisian, kendaraan angkutan barang berkontribusi 10,5 persen terhadap total kecelakaan lalu lintas, menempati posisi kedua setelah kendaraan rodadua.

"Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan barang ODOL tercatat sebanyak 150 ribu kasus selama 2024 dengan banyak korban jiwa berjatuh, ini terlalu banyak," ujar AHY dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Atas kasus ini, AHY mengatakan bahwa keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam merancang dan menegakkan kebijakan transportasi, tak terkecuali penanganan ODOL. AHY menekankan bahwa setiap nyawa yang hilang akibat praktik ODOL adalah kerugian besar yang tidak bisa dikompensasi.

"Makanya kampanye kita adalah satu nyawa terlalu banyak, tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia," sambung AHY.

Hilangnya jiwa akibat kecelakaan merupakan salah satu kerugian immaterial. Kerugian immaterial lainnya bisa berupa rasa sakit secara fisik dan penderitaan psikologis akibat luka-luka yang diderita dari kecelakaan.

Kemudian juga bisa menumbulkan rasa trauma psikologis, terutama bagi korban yang mengalami cedera serius atau kehilangan orang yang dicintai. Kerugian lainnya bisa berupa kehilangan waktu untuk bekerja, beraktivitas, atau menjalani kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut AHY mengatakan, selain mengakibatkan korban jiwa dan kerugian immaterial, dampak ODOL juga dirasakan dalam bentuk kerugian ekonomi yang besar, terutama akibat kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya. Menurut AHY, jalan-jalan yang rusak akibat kendaraan dengan muatan berlebih membutuhkan anggaran pemeliharaan dan perbaikan yang tidak sedikit setiap tahunnya.

"Jalan-jalan rusak yang harus diperbaiki setiap tahun itu bisa mencapai Rp 41 triliun, dan kalau dikonversi untuk program prorakyat, angkanya sangat signifikan," lanjut dia.

AHY menyebut distribusi kendaraan ODOL paling banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian wilayah Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan. AHY

menambahkan berdasarkan data terkini, terjadi peningkatan 9,8 persen jumlah kendaraan angkutan barang dari tahun sebelumnya, dengan hampir separuh populasi kendaraan tersebut berada di Pulau Jawa.

"Sebaran kendaraan angkutan barang memang yang paling besar di wilayah Pulau Jawa, dan ini jadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan pengendalian," ucap AHY.

Sebagai bagian dari strategi nasional, lanjut AHY pemerintah telah menyusun sembilan rencana aksi dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat sistem logistik nasional melalui kebijakan Zero ODOL. Dari sembilan rencana itu, AHY menyoroti tiga fokus utama yang akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat demi mendorong perbaikan sistemik.

"Kita fokus pada tiga rencana aksi yakni pengawasan pencatatan dan penindakan kendaraan angkutan barang; penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi; serta deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas dari penegakan Zero ODOL," kata AHY.

AHY juga mengungkapkan ODOL ini adalah permasalahan yang sudah berlarut-larut, sekian belas tahun ups and downs. Menurut AHY, penanganan ODOL memerlukan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap kondisi lapangan dan realita industri logistik. Pemerintah tidak bisa hanya menegakkan aturan tanpa menyiapkan solusi alternatif bagi para pelaku usaha dan pengemudi yang terdampak.

"Untuk bisa menangani, menertibkan, sekaligus juga menghadirkan polisi, kebijakan yang memang bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi," tegas AHY.

AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tidak berhenti di tengah jalan karena kendala teknis maupun nonteknis. AHY menggarisbawahi bahwa sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan upaya penertiban ODOL.

"Jangan sampai semangat di awal, di tengah-tengah lemas atau terganggu atau terhambat oleh faktor-faktor lain teknis maupun non teknis," sambung AHY.

Untuk mengatasi masalah ini, AHY dengan tegas memaparkan tiga agenda utama yang menjadi fokus pemerintah dalam menangani persoalan ODOL secara menyeluruh dan sistemik. AHY menyampaikan agenda pertama adalah pemberantasan praktik pungutan liar

(pungli) yang kerap terjadi dalam ekosistem angkutan barang, mulai dari jalan tol hingga terminal bongkar muat.

"Kita juga harus membahas pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang, ini sesuatu yang sudah menjadi permasalahan dan diketahui secara umum," ucap AHY.

Akibat praktik pungli, supir bisa mengeluarkan dana Rp100 juta-150 juta per tahun. Dengan demikian, setiap hari seorang sopir truk harus menyiapkan uang hampir Rp500 ribu hanya untuk pungli.

Untuk itu, AHY memandang pentingnya menindak tegas pungli yang merugikan pengemudi truk dengan dimensi dan muatan melampaui ketentuan (Over Dimension and Over Loading - ODOL).

Ia mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi di mana saja daerah-daerah yang sering menjadi lokasi pungli. "Ada datanya. Setiap truk harus mengeluarkan Rp100-150 juta per tahun. Jadi, kenapa biaya logistiknya besar? Menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini," ucap AHY setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

AHY meyakini apabila pungli bisa dihentikan dan ditindak dengan tegas maka biaya transportasi logistik akan berkurang. Atas dasar tersebutlah, AHY mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan RI, Korlantas Polri dan lain-lain. "Tindakan harus tegas. Jelas melawan hukum itu. Siapa pun harus kita tindak dengan tegas," kata AHY.

Dengan biaya yang lebih efisien, AHY meyakini tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengatakan truk ODOL lebih murah.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal menyampaikan kepolisian sudah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap anggotanya yang kedapatan atau dilaporkan melakukan pungli.

"Kami dari kepolisian sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terstruktur, baik dari pusat sampai ke bawah, dan tentunya pengawasan dan penindakan terhadap anggota yang kedapatan melakukan pungli," ucap Faizal.

Langkah tersebut merupakan salah satu upaya mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL.

AHY menegaskan pemberantasan pungli harus dilakukan dengan langkah-langkah konkret dan tanpa pandang bulu agar tercipta keadilan dan transparansi. AHY memastikan pemerintah akan mendorong pengawasan lebih ketat dan memperkuat peran aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. "Kita harus

ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan juga tidak tebang pilih," lanjut AHY.

Kemudian Agenda yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang yang selama ini menjadi kelompok rentan dalam sistem logistik nasional. AHY menekankan para pengemudi seringkali menjadi pihak yang dikambinghitamkan dalam berbagai insiden kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas.

"Padahal mereka hanya menjalankan tugas yang seringkali penuh dengan risiko yang di luar dari kemampuan mereka," ungkap AHY.

AHY menerangkan bahwa banyak kasus di mana para pengemudi tidak memiliki pilihan lain selain mengemudikan kendaraan dengan beban berlebih demi memenuhi tuntutan pekerjaan. AHY menyatakan pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap para sopir, yang menjalani profesi berat namun kerap dilupakan dalam kebijakan publik.

"Karena bagi mereka ini adalah nafkah yang halal, jadi kita harus berpihak pada para pengemudi," lanjut dia.

AHY berharap langkah-langkah strategis yang dirancang hari ini akan mampu memperbaiki kondisi kerja sopir serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan secara keseluruhan. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem logistik yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

"Kita bisa menyelamatkan pengemudi sekaligus upaya kita meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus juga memberikan rasa aman, nyaman bagi para pengguna lalu lintas lainnya," ungkap AHY.

AHY menyampaikan agenda ketiga yang menjadi perhatian adalah deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang yang dinilai masih tumpang tindih dan membingungkan pelaku usaha. AHY menekankan pentingnya perbaikan regulasi agar tidak menciptakan celah pelanggaran atau kebingungan dalam implementasi.

"Yang terakhir agendanya adalah deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait dengan angkutan barang," kata AHY.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyampaikan implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017. Namun, belum berjalan optimal akibat berbagai penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak.

Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda sejak 2017 akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional. (rls,ist/lut)



MK Tolak Gugatan Supaya Presiden dan Wapres Minimal S1

Gugatan yang meminta agar calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah sarjana atau S-1 akhirnya termentahkan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu tersebut.

Putusan penolakan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (17/7/2025). Permohonan nomor 87/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh Hanter Oriko Siregar, Daniel Fajar Bahari Sianipar, dan Horison Sibarani.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua orang yaitu Konsultan Hukum, Hanter Oriko Siregar, dan mahasiswa Horison Sibarani. Mereka menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Pasal 169 huruf r 'berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat'

Lebih lanjut pemohon menyampaikan bahwa Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, mengadopsi konsep sebagai negara hukum "rechts staat" yang dikembangkan oleh Frederick Julius Stahl atau "the rule of law" yang dipopulerkan oleh A. V Dicey. Kedua konsep negara hukum tersebut menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan penguasa belaka. Konsep tersebut dimuat dalam

konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dan dapat dimaknai juga bahwa sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia.

Kemudian, komitmen bangsa Indonesia tersebut terlihat dalam pembentukan konstitusi yakni seluruh pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Terutama, UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi sebagai supreme law of the land dalam hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemohon juga mengutip pendapat yang Dr. Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum. dalam bukunya berjudul Hukum Hak Asasi Manusia, Hal. 48 paragraf kedua menjelaskan, "Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai pelaksana demokrasi, karena konstitusi merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi".

Kemudian, Indonesia yang menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan negara merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal

itu sejalan dengan yang ditulis Benny K Harman dalam bukunya yang berjudul Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi—Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD hlm. 12, menjelaskan "bahwa dalam teori norma atau teori supremasi konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 adalah bentuk norma hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, sehingga semua institusi negara, termasuk institusi perwakilan rakyat, terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah UUD NRI Tahun 1945".

Berdasarkan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki



"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,"

SUHARTOYO

Ketua MK

peran yang sangat penting dan inti dari pusat pemerintahan negara serta mesin dalam pengelolaan suatu struktur negara agar berjalan dengan baik. Secara fungsional, Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, dan presiden memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya yakni menyusun dan mengeksekusi kebijakan nasional, menjadi panglima tertinggi TNI, bertanggung jawab terhadap diplomasi internasional, menentukan arah pembangunan (hukum, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan teknologi nasional.

Oleh karena itu, guna dapat mengemban tugas dan amanah tersebut dengan ideal, jabatan presiden ini menuntut tidak hanya kecakapan administratif atau popularitas elektoral, tetapi juga kapasitas intelektual dan akademik yang tinggi. Menurut para Pemohon, Pendidikan Tinggi atau minimal sarjana adalah parameter.

Kemudian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan pemaknaan baru yang diminta oleh pemohon malah mempersempit ruang warga negara untuk menjadi calon presiden-wapres. MK menilai pasal itu sama sekali tidak menutup kemungkinan warga dengan pendidikan lebih tinggi dari SMA

untuk diusung sebagai capres-cawapres oleh partai politik peserta pemilu.

"Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon," ujar MK.

Meski demikian, MK menyerahkan kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk membahas soal syarat pendidikan capres-cawapres jika diperlukan. Menurut MK, banyak calon presiden dan wapres yang telah memiliki latar belakang pendidikan lebih dari syarat minimum dalam UU.

"Telah ternyata norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang mengatur mengenai syarat pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden yakni tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, adalah tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara," ujar MK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan itu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. MK pun menolak permohonan tersebut.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suharto.

Suharto juga menyatakan dirinya memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap perkara ini. Dia mengatakan seharusnya MK tidak menerima perkara tersebut karena menurutnya pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. (rls,ist/lut)